



Sulap Kampung Lampion Jadi Hunian Nyaman

YOGYAKARTA, joglo jogja – Penataan kawasan kumuh di bantaran sungai terus menjadi prioritas Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta. Terbaru, permukiman di Kampung Lampion, Kotabaru, yang berada di tepian Sungai Code, kini mulai bersalin rupa. Melalui skema kolaborasi lintas sektor, program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di wilayah tersebut resmi berlanjut.

Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo menjelaskan, proyek di Kampung Lampion tahun ini merupakan pengerjaan tahap kedua. Langkah ini menjadi estafet dari program serupa yang telah sukses merampungkan sejumlah unit hunian layak pada Tahun 2025 lalu.

"Ini merupakan bentuk kepedulian dari UII yang membantu mencarikan dana anggaran dari mitra lembaga di India untuk pembangunan sejumlah rumah layak huni. Termasuk diantaranya pembangunan di Kampung Lampion ini," ujarnya.

Pemkot Yogyakarta juga mendukung pembangunan rumah layak huni dengan APBD. Di samping itu juga Panitikismo Keraton Yogyakarta dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk penerbitan legalitas tanah dan surat kekancingan.

Hasto menilai pembangunan rumah layak huni itu menjadi wujud kolaborasi pentahelix dari semua pihak.

"Ternyata kalau pekerjaan itu agak rumit dan sulit, kalau dikeroyok itu bisa selesai dalam waktu cepat. Kemudian semua legalitasnya terpenuhi. Karena dulu untuk kekancingannya juga menjadi masalah, tetapi sekarang ini sudah terus kekancingannya



KOKOH: Salah satu rumah program perbaikan RTLH di bantaran Kali Code setelah di bangun, kemarin (22/4).

ada. Jadi rumah ini tidak hanya selesai secara fisik saja, tetapi legal standingnya juga terselesaikan," kata Hasto, ditemui saat peresmian pembangunan rumah layak huni tahap I dan kick off tahap II di Kampung Lampion Kotabaru, belum lama ini.

Pihaknya berharap, masyarakat yang menempati rumah menyukuri dengan cara merawat dan menjaga kebersihan bangunan. Di samping itu tidak membuang sampah ke Sungai Code. Oleh sebab itu, pihaknya titip pesan untuk menjaga kebersihan sungai.

Menurutnya, salah satu kunci pembangunan rumah layak huni bisa diterima masyarakat karena memastikan warga tidak dirugikan dan mengakomodasi aspirasi dan harapan warga. Di lokasi yang sama, Kepala

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta, Umi Akhsanti memberikan rincian teknis. Pada fase pertama, pihaknya telah menyelesaikan 10 unit rumah. Kini, di tahap kedua, sasaran diperluas dengan membangun 8 unit di Kampung Lampion dan 6 unit tambahan di Kelurahan Terban.

Umi menyebut, anggaran yang dikucurkan untuk 8 rumah di Kotabaru mencapai Rp 2 miliar. Sementara untuk 6 unit di Terban menelan biaya sekitar Rp 1,2 miliar yang bersumber dari APBD Kota Yogyakarta.

"Prosesnya sudah terkontrak. Kami targetkan semua rampung tepat waktu agar segera bisa dimanfaatkan warga," tegas Umi. (eri/bid/wa)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 19 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005